



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2017 - 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara	30
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra Kabupaten Aceh Tenggara	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	58
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	73
BAB VIII PENUTUP	79
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 ini dapat diselesaikan.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini menjabarkan RPJMD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022.

Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati sesuai visi dan misi yang ditetapkan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.



Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD. Segala kekurangan dalam Renstra ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya, dan akan diperbaiki untuk masa yang akan datang.

Kutacane, Desember 2018
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Tenggara
P.t. Kepala,



BANRI SAPUTRA, S.Pd, M.Si
Pembina
NIP. 19810806 200504 1 001

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

<i>Renstra</i>
Disdikbud Agara 2018-2022
<i>BAB I berisi:</i>
<i>1.1 Latar Belakang</i>
<i>1.2 Landasan Hukum</i>
<i>1.3 Maksud dan Tujuan</i>
<i>1.4 Sistematika Penulisan</i>

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah baik di pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk memberikan *raison de'etre* pemerintahan yaitu kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Untuk memberikan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan.

hannya (legitimasi), pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan jaman. Terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pertama: perlu aspiratif terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitive terhadap kebutuhan Pendidikan umumnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pendidikan serta mau mendengarkan apa kemauannya. Kedua: pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam melaksanakan pendidikan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan, bukan hanya sebagai objek pendidikan.

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara lebih tegas dalam UUD 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara. Oleh karena itu urusan pemerintahan wajib di bidang pendidikan seharusnya menjadi prioritas, karena sesuai kesepakatan anggaran secara nasional Bidang Pendidikan dianggarkan sekurang-kurangnya 20% baik dari APBN maupun APBD. Selain itu, diamanatkan pula agar pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sesuai dengan Undang-undang turunannya, diamanatkan terjaminnya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan guna menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal nasional, dan global. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Tenggara khususnya dan Indonesia pada umumnya senantiasa harus melakukan pembaharuan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Percepatan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kreasi teknologi dalam berbagai bidang mengakibatkan perubahan besar pada tatanan berbagai aspek kehidupan. Terjadinya revolusi digital membawa dampak yang luas pada berlangsungnya perubahan dalam aktivitas ekonomi, pola hubungan pada berbagai aspek kehidupan antar individu, antar kelompok masyarakat, bahkan antar bangsa dan negara. Dalam kondisi demikian dunia beserta kehidupannya dalam konteks ruang dan waktu berubah dengan sangat cepat. Kreativitas dan inovasi menjadi sangat penting dalam menentukan eksistensi individu, organisasi dan masyarakat dan bahkan bangsa.

Kecenderungan global yang membawa perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan, berimplikasi pada kepentingan untuk merancang strategi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan menjadi suatu keniscayaan dalam menghadapi kecepatan gelombang perubahan yang berlangsung sejak awal Abad XXI dan akan terus berlanjut pada masa-masa berikutnya. Terkait dengan hal tersebut di tingkat dunia diamanatkan berbagai program pendidikan diantaranya : dasawarsa pendidikan untuk semua (*education for all*), literasi dunia (*the world literacy*), pendidikan bagi pembangunan berkelanjutan (*education for sustainability development*), dan konvensi

internasional pembangunan milenium (*millennium development goals*) yang mencakup pula bidang pendidikan.

Perubahan yang berlangsung juga menumbuhkan kecenderungan semakin pentingnya pendidikan selama hayat (*lifelong learning*); pendidikan lebih diorientasikan pada pengembangan kompetensi; bergesernya pengajaran ke arah pembelajaran (*student centered learning*), dan pentingnya pengembangan alternatif-alternatif kecerdasan yang bersifat majemuk dalam pelaksanaan pendidikan. Selain itu juga muncul kecenderungan berkembangnya tuntutan ukuran bertaraf dunia bagi pendidikan (*world class schools, world class university*) dan semakin berkembangnya tuntutan terciptanya penjaminan dan pemeliharaan mutu pendidikan, yang pada akhirnya menumbuhkan perumusan kerangka kualifikasi internasional (*international qualification framework*) dalam dunia pendidikan. Meskipun terlambat, Indonesia telah meresponnya dengan menerbitkan Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Berbagai perubahan yang berlangsung sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta implikasinya dalam dunia pendidikan, menuntut pengembangan perencanaan yang cermat dalam membangun dunia pendidikan di Indonesia.

Upaya tiada henti untuk memperbarui pendidikan, yang seharusnya diorientasikan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk menghadapi persaingan global yang semakin meningkat sejalan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat dunia. Dorongan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guna menjawab tantangan persaingan global, seharusnya tetap ditempatkan dalam bingkai jati diri bangsa. Dengan demikian kemajuan yang dicapai dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia, tidak membuat bangsa ini terhanyut oleh arus budaya dan perilaku asing, serta mengabaikan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi budaya bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka seharusnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, pelaksanaannya tetap dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 serta semangat Bhineka Tunggal Ika dan komitmen atas tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 ini, dikembangkan dan disusun dengan mempertimbangkan dan berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2029 beserta lampirannya;
2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022. Sementara itu Renstra yang telah disusun untuk periode 5 (lima) tahunan harus diakui, seringkali hanya disikapi sebagai dokumen yang layak ditempatkan di rak arsip dan tidak perlu dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, yang harus dilakukan oleh masing-masing unit kerja di suatu Perangkat Daerah. Oleh karena itu hal-hal yang harus diperhatikan antara lain :
 - Pemahaman mendasar tentang tujuan dan pentingnya perencanaan strategis;
 - Perhatian terhadap perencanaan yang dibuat dan keterpaduannya dengan proses yang ditetapkan untuk menjamin keberhasilan pencapaiannya;
 - Kehati-hatian dalam menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik serta menentukan langkah-langkah tindakan secara terbuka dan juga kehati-hatian dalam memanfaatkan pandangan kelompok pemangku kepentingan utama.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, ditetapkan bahwa Renstra SKPD termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus didasarkan pada RPJMD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu dalam penyusunan renstra ini, diperlukan penyesuaian target menjadi penyiapan kerangka dasar rancangan Renstra serta pengumpulan dan pengolahan data termasuk informasi pendukung lainnya, yang didasarkan pada RPJMD Kabupaten Aceh Tenggara 2017-2022 yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Berdasarkan atas RPJMD Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017-2022 tersebut pada akhirnya akan dijadikan Pedoman penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017-2022 yang memuat perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi program dan kegiatan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Aceh Tenggara selama 5

tahun yang nantikan akan diterjemahkan secara terinci pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja selama periode Renstra.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007, tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
35. Qanun RPJM Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara ini merupakan rancangan pembangunan bidang pendidikan yang disusun dan diperuntukkan bagi Perangkat Daerah (PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara. Selain itu, juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah bidang pendidikan di Kabupaten Aceh Tenggara untuk periode 2017-2022. Berkenaan dengan hal tersebut dapat dirumuskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 sebagai berikut.

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022.

Adapun maksud dari penyusunan renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan gambaran tentang pelayanan, sumberdaya, dan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta tantangan dan peluang pengembangan layanannya.
- b. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis pendidikan di Kabupaten Aceh Tenggara dan keterkaitannya dengan upaya pembangunan pendidikan untuk jangka waktu lima tahun mendatang.
- c. Penetapan tujuan, sasaran dan strategi kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Aceh Tenggara, disertai dengan gambaran Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifnya.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara adalah :

- a. Memberikan kerangka acuan, dan pedoman bagi jajaran pejabat struktural, staf, dan kelompok fungsional, di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).
- b. Memberikan acuan dan wawasan kepada pelaku dan pemangku kepentingan bidang pendidikan dalam merencanakan kegiatan, dan mengusulkan ide-ide kreatif maupun mengembangkan sikap kritis yang memberikan kemanfaatan bagi upaya, dan pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Tenggara.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022, disusun dalam tiga bagian besar. Bagian pertama menguraikan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dan isu-isu strategis. Bagian dua membahas visi, misi hingga program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara. Bagian tiga menguraikan indikator kinerja dan rancangan monitoring serta evaluasi implementasi Renstra. Secara rinci sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dapat diuraikan sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, mencakup: latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara
- BAB II : Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, mencakup : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumberdaya, Kinerja Pelayanan, serta tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan.
- BAB III : Permasalahan dan isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara,

mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L); Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Penentuan Isu-isu Strategis.

- BAB IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, mencakup: Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara; Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara; dan Strategi dan Kebijakan.
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII : Penutup

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara

BAB II berisi:	
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara mengemban tanggung jawab bagi tercapainya keberhasilan pembangunan bidang pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan oleh Pemimpin Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara. Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe - A. Sehingga dapat dijelaskan dan dijabarkan sebagai berikut :

2.1.1. Kedudukan dan Tugas Pokok

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

2.1.2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan dan kebudayaan ;

- c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelayanan umum dibidang pendidikan dan kebudayaan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, ketenagaan serta pendidikan nonformal, informal dan pendidikan kebudayaan ;
- e. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja dinas;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3. Kewenangan

- 1) perumusan kebijakan operasional dibidang pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
- 2) perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah serta pendidikan nonformal dan informal ;
- 3) sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten ;
- 4) pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan nonformal dan informal ;
- 5) pengusulan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, serta satuan atau penyelenggara pendidikan nonformal;
- 6) penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar;
- 7) peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten ;
- 8) penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya ;
- 9) pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya ;
- 10) koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar ;
- 11) sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar ;
- 12) sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;

- 13) sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini , pendidikan dasar ;
- 14) pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah;
- 15) pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan non formal;
- 16) pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan ;
- 17) pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal ;
- 18) perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya ;
- 19) peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah serta pendidikan nonformal ;
- 20) pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah serta pendidikan nonformal;
- 21) membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah serta pendidikan nonformal ;
- 22) koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten ;
- 23) penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten ;
- 24) pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah serta pendidikan nonformal skala kabupaten ;
- 25) pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah serta pendidikan non formal skala kabupaten ;
- 26) membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal ;
- 27) supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah serta pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan ;

- 28) supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu ;
- 29) evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten ;
- 30) penyelenggaraan penerimaan siswa dari masyarakat minoritas terbelakang dan/atau tidak mampu;
- 31) penyelenggaraan dan pengawasan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga pendidikan yang profesional serta persyaratan jabatan;
- 32) pembinaan terhadap UKS disemua jenjang pendidikan.
- 33) Pembinaan terhadap Perpustakaan Sekolah disemua jenjang pendidikan.
- 34) pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi serta perumusan kebijakan kabupaten dibidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- 35) penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian bagi pelajar;
- 36) pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan;
- 37) pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penyelenggaraan diklat bidang sejarah;
- 38) penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten yang meliputi : penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa;
- 39) penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni bagi pelajar;
- 40) penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern bagi pelajar;
- 41) pelaksanaan konggres sejarah tingkat daerah kabupaten;
- 42) pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten;
- 43) pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten;
- 44) pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah;
- 45) pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah daerah dan sejarah kabupaten;
- 46) pemetaan sejarah skala kabupaten;
- 47) koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten;

2.1.4 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, terdiri dari :

- 1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - d. Bidang Pembinaan SD
 - e. Bidang Pembinaan SMP
 - f. Bidang Kebudayaan
 - g. Bidang Pembinaan Ketenagaan
 - h. UPTD, dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Sekretariat, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, :
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMD
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantu
- 3) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf C membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- 4) Bidang Pembinaan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- 5) Bidang Pembinaan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

- 6) Bidang Kebudayaan Sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf f membawahi :
 - a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
 - b. Seksi Sejarah dan Tradisi
 - c. Seksi Kesenian
- 7) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi :
 - a. Seksi PTK PAUD dan pendidikan Non Formal
 - b. Seksi PTK Dikdas
 - c. Seksi Tenaga Kebudayaan

2.2. Sumberdaya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara

a. Lembaga Pendidikan

Kondisi Lembaga pendidikan di Kabupaten Aceh Tenggara saat ini dalam naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta bertanggungjawab penuh terhadap terselenggaranya pendidikan pada sekolah-sekolah yang terdapat di Aceh Tenggara. Berikut gambaran lembaga pendidikan di Kabupaten Aceh Tenggara:

Tabel: 2.1
Lembaga Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara

No	Jenjang	Jumlah		Total
		Negeri	Swasta	
1	PAUD/TK	15	267	282
2	SD	144	30	174
3	SMP	36	30	66
Jumlah		195	327	522

Sumber Data: Profil Pendidikan Tahun 2017-2018

Lembaga-lembaga tersebut bertanggungjawab dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada para siswa dan anak didik pada masing-masing lembaga, didalam penyelenggaraannya diketahui bahwa fakta data diatas menunjukkan kwantitas PAUD belum memenuhi standart keberadaannya dan belum menyentuh seluruh desa yang terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara yang berjumlah 384 desa, untuk itu perlu wacana penambahan PAUD di desa-desa yang belum terdapat lembaga PAUD tersebut.

b. Sumberdaya Aparatur

Dalam rangka menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki sumberdaya aparatur sebanyak 58 orang PNS . Namun secara keseluruhan sumberdaya aparatur yang terdapat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.2
Sumberdaya Aparatur Pendidikan Tahun 2018

No	Nama Jabatan	Status		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	Kepala Dinas	1		1
2	Sekretaris	1		1
3	Kepala Bidang	5		5
4	Kasubbag/Kasi	18		18
5	Staf Dinas Pendidikan	34	31	65
6	Kepala UPTD	5		5
7	Pengawas	65		65
8	Guru TK	54	507	561
9	Guru SD	1.253	343	1596
10	Guru SMP	223	600	823
J u m l a h		1.659	1.481	3.140

Sumber : Data Pokok Pendidikan Tahun 2017/2018

Untuk mendukung program-program kegiatan baik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, UPTD dan Sekolah-sekolah sangat ditentukan oleh latar belakang pendidikan masing-masing pegawai/karyawan, serta ketrampilan dan kemampuan yang dimilikinya. Jenjang pendidikan PNS dan Non PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Data PNS dan NON PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2017/2018

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD Sederajat		
2	SMP Sederajat		
3	SMA Sederajat	10	5,8
4	Diploma 1		
5	Diploma 2	1	0,01
6	Diploma 3		
7	Strata 1 / Diploma 4, S.1/D,4	39	1,48
8	Strata 2 / S.2/S.3	8	7,25
J u m l a h		58	

Sumber : Data Pokok Pendidikan Tahun 2017/2018

2. 3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.

Untuk menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, dapat dilakukan dengan menguraikan berbagai capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang berhasil diraih Kabupaten Aceh Tenggara hingga akhir periode pembangunan pendidikan 2017-2022.

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Aceh Tenggara tidak luput dari perhatian terhadap indikator-indikator kinerja utama. Oleh karena itu, sebaiknya terdapat uraian penjelasan mengenai indikator-indikator tersebut. Berikut ini akan dibahas lebih detail mengenai indikator berdasarkan masing-masing program :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Satuan PAUD (Pendidikan anak usia dini) tercatat sebanyak 277 PAUD (TK, KB, SPS dan TPA), dengan jumlah peserta didik 6.201 Anak Usia Dini dan guru 647 orang pada akhir Tahun Ajaran 2017/2018. Pada Tahun Ajaran 2018/2019, jumlah meningkat menjadi 282 satuan PAUD, dengan peserta didik 8.119 anak Usia dini dan guru 822 orang, sementara jumlah TK Negeri sebagai TK Pembina

di Kabupaten/Kota adalah 4 lembaga dan TK Negeri satu atap 11 lembaga. Pada Tahun Ajaran 2018/2019 jumlah lembaga pendidikan TK dan PAUD di Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 282 Lembaga terjadi peningkatan sebanyak 5 satuan PAUD dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah satuan PAUD diikuti dengan peningkatan jumlah peserta didik, hal itu terlihat dari jumlah anak usia dini PAUD berjumlah dari 6.201 menjadi 8.119 anak usia dini dengan selisih sebanyak 1.918 anak usia dini. Hal ini disebabkan karena antusias dari masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini.

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Untuk jenjang pendidikan dasar (Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun), pada Tahun Ajaran 2017/2018 tercatat jumlah SD Negeri dan Swasta sebanyak 172 sekolah dengan jumlah 24.405 siswa dan guru 1.595 orang, serta jumlah SMP Negeri dan Swasta sebanyak 72 sekolah dengan jumlah 9.167 siswa dan guru PNS 504 orang dan non PNS 629. Terjadi peningkatan pada jenjang pendidikan dasar (Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun), dimana pada Tahun Ajaran 2018/2019 tercatat jumlah SD sebanyak 168 sekolah dengan jumlah 29.034 siswa dan guru 1.601 orang, serta jumlah SMP sebanyak 67 sekolah dengan jumlah 13.310 siswa orang dan guru 1.133 orang.

3. Program Pendidikan Non Formal

Pada jenjang pendidikan non formal dan informal, Tahun Ajaran 2017/2018 tercatat dengan jumlah : 37 Lembaga yang terdiri dari Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) : 17. PKBM : 19 dan SPNF : 1 lembaga. Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan SPNF/ SKB menyelenggarakan Program Pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C dengan warga belajar berjumlah 947 orang dan tutor 124 orang.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A Angka Partisipasi Kasar																				
1	a. APK PAUD	%	100			100	100	100	100	100	43,30	43,32	43,35	43,37	43,40	1	1	1	1	1
	b. APK SD/MI/Paket A	%	100			100	100	100	100	100	80	85	90	95	100	1	1	1	1	1
	c. APK SMP/MTs/Paket B	%	100			100	100	100	100	100	80	85	90	95	100	1	1	1	1	1
1.2 Angka pendidikan yang ditamatkan																				
	a. Tamat SD Sederajat	%	100			100	100	100	100	100	95,31	96,31	97,31	98,31	99,31	1	1	1	1	1
	b. Tamat SLTP Sederajat	%	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
	c. Tamat SLTA Sederajat	%	100			100	100	100	100	100	82,78	83,78	84,78	85,78	86,78	1	1	1	1	1
	d. Tamat DI/DII/DIII	%	100			100	100	100	100	100	2,5	2,75	3	3,5	3,75	1	1	1	1	1
	e. Tamat DIV/S1	%	100			100	100	100	100	100	7	7,25	7,5	7,75	8	1	1	1	1	1
1.3 Angka Partisipasi Murni																				
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100			100	100	100	100	100	89,02	90,02	90,02	91,02	92,02	1	1	1	1	1
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	100			100	100	100	100	100	83,69	84,69	84,69	85,69	86,69	1	1	1	1	1
1.4 Angka Partisipasi Sekolah																				
	a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100			100	100	100	100	100	99,5	99,51	99,52	99,53	99,54	1	1	1	1	1
	b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	100			100	100	100	100	100	98,54	98,55	98,56	98,57	98,58	1	1	1	1	1
1.5 Angka Putus Sekolah																				
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	100			100	100	100	100	100	0,02	0,01	0	0	0	1	1	1	1	1
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	100			100	100	100	100	100	0,04	0,03	0,02	0,01	0	1	1	1	1	1
1.6 Angka Kelulusan																				
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100			100	100	100	100	100	95,31	96,31	97,31	98,31	99,31	1	1	1	1	1
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
1.7 Angka Melanjutkan (AM) Sekolah																				

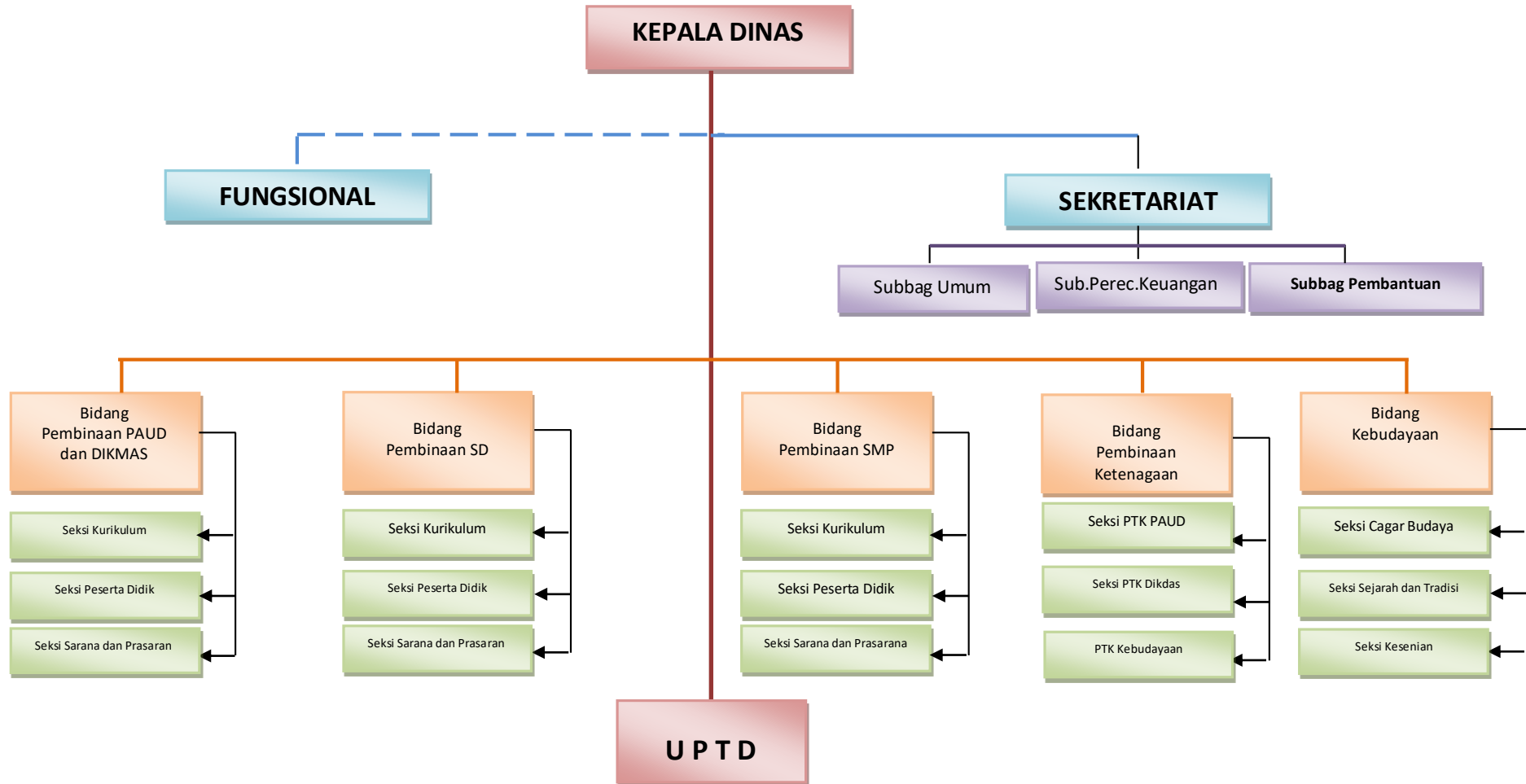
a.	Angka Melanjutkan (AM) Sekolah SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	86,24	87,24	88,24	89,24	90,24	1	1	1	1	1
b.	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100	100	100	100	100	93,45	94,45	95,45	96,45	97,45	1	1	1	1	1
1.8 Fasilitas Pendidikan																		
a.	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	100	100	100	100	100	100	92	94	96	97	98	1	1	1	1	1
b.	Sekolah Pendidikan SMP sederajat kondisi bangunan baik	%	100	100	100	100	100	100	92	94	96	97	98	1	1	1	1	1
1.9 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah																		
a.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD	Rasio Indeks 100	100	100	100	100	100	100	97,56	97,56	97,56	97,56	97,56	1	1	1	1	1
b.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP	Rasio Indeks 100	100	100	100	100	100	100	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	1	1	1	1	1
1,10 Rasio Guru terhadap Murid																		
a.	Rasio Guru terhadap murid SD	Murid/Guru	100	100	100	100	100	100	22,1	22,2	22,3	22,4	22,5	1	1	1	1	1
b.	Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs	Murid/Guru	100	100	100	100	100	100	22,1	22,2	22,3	22,4	22,5	1	1	1	1	1
c.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terakreditasi	Sekolah PAUD	100	100	100	100	100	100	15	30	45	60	75	1	1	1	1	1
1.11	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	100	100	100	100	100	100	92	94	96	97	98	1	1	1	1	1
1.12	Persentase jumlah penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis	%	100	100	100	100	100	100	78,73	78,75	78,77	78,8	78,85	1	1	1	1	1
1.13	Meningkatnya Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	%	100	100	100	100	100	100	70	75	80	85	90	1	1	1	1	1
1.14	Meningkatnya Angka Melek Huruf usia 15 - 24 tahun	%	100	100	100	100	100	100	80	82	85	90	95	1	1	1	1	1
1.15	Persentase angka partisipasi kasar (APK) SLB dan Layanan Khusus	%	100	100	100	100	100	100	80	85	90	95	100	1	1	1	1	1
1.16	Persentase Sekolah yang melaksanakan kurikulum berbasis syari'at	%	100	100	100	100	100	100	70	72	74	75	75	1	1	1	1	1

1.17 Persentase Guru yang mengikuti peningkatan kemampuan Dasar Keislaman	%	100	100	100	100	100	100	100	72	74	76	80	85	1	1	1	1	1
1.18 Persentase Sekolah yang memenuhi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal	%	100	100	100	100	100	100	100	80	85	90	95	100	1	1	1	1	1
1.19 Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100	75	78	80	82	85	1	1	1	1	1

Gambar: 2.4

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

(Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe - A



2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Aceh Tenggara.

Analisis atas tantangan yang dihadapi dan peluang bagi pengembangan layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara memerlukan analisis atas kondisi internal dan eksternal. Untuk itu diperlukan analisis atas kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), tantangan (*Threat*), atau analisis SWOT atas kondisi pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Aceh Tenggara yang pada dasarnya merupakan gambaran tentang kinerja layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara. Faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*Strength*) dalam upaya pengembangan layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya pendanaan yang besar untuk pengembangan program-program layanan pendidikan dan kebudayaan beserta realisasinya, sejalan dengan komitmen Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan 20% dari APBN, dengan pendanaan yang besar pula baik bersumber dari APBD Kabupaten, melalui Bantuan Keuangan Provinsi dan APBN (baik bansos dan DAK);
2. Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara sangat memadai, dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan pekerjaan berdasarkan visi organisasi, dilengkapi dengan kualifikasi akademik dan keterampilan yang sesuai bagi upaya pengembangan layanan pendidikan dan kebudayaan;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang sangat memadai sebagai faktor pendukung bagi pengembangan program-program layanan pendidikan dengan Sistem Layanan Terpadu Pendidikan (SLTP);
4. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan organisasi yang mampu menciptakan budaya kerja yang produktif dan iklim organisasi yang kondusif di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Penguasaan dan penerapan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang mampu meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.

Faktor-faktor internal yang menjadi kelemahan (weakness) dalam upaya pengembangan layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengalokasikan 20% dari APBD Kabupaten Aceh Tenggara untuk pendanaan dalam pengembangan program-program layanan pendidikan di Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerataan penempatan dan alokasi sumberdaya manusia pada berbagai bidang dan sub bagian yang kurang memperhatikan jenjang karir dan tingkat kemampuan serta keterampilan, mengakibatkan adanya perbedaan produktivitas dan hasil kerja pada masing-masing bidang dan sub bagian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Intensitas komunikasi dan kerjasama antar bidang dan sub bagian masih memerlukan peningkatan terutama terkait dengan implementasi program yang pelaksanaannya membutuhkan kerjasama dan kebersamaan antar bidang maupun antar sub bagian;
4. Pengembangan program kerja tahunan masih belum mengacu pada perencanaan strategis jangka menengah, mengakibatkan kontinuitas dan keberlanjutan program dari tahun ke tahun sesuai dengan rencana jangka menengah belum tercapai dan tidak mampu mengantisipasi perkembangan yang berlangsung di masyarakat;
5. Pada beberapa implementasi program masih dijumpai kurang jelas dan kurang tegas dalam pelimpahan wewenang dari tingkat pimpinan kepada bawahan, serta kurang sesuai penunjukan bidang atau sub bagian untuk melaksanakan program-program kerja yang dilaksanakan;
6. Perbedaan struktur organisasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, dan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengakibatkan efektivitas penanganan program-program layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kurang memadai, karena ditempatkan dan ditangani oleh bidang atau sub bagian yang kurang relevan;

Faktor-faktor eksternal yang merupakan peluang (opportunity) dalam upaya pengembangan layanan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh adalah sebagai berikut :

1. Makin meningkatnya kebutuhan, kesadaran dan perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai faktor penentu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan harapan untuk meraih keberhasilan di masa depan;
2. Bidang pendidikan menjadi prioritas utama dalam pengembangan program-program pembangunan baik pada skala nasional maupun regional di tingkat kabupaten, sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran bahwa upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
3. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perkembangan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat, menumbuhkembangkan kebutuhan akan sumberdaya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang beragam, dan pada gilirannya meningkatkan perluasan kebutuhan akan jasa layanan pendidikan;
4. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan, sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan akan pendidikan di kalangan masyarakat. Lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat makin meningkat keberagaman maupun kualitasnya;
5. Arus globalisasi, keterbukaan dan makin meningkatnya persaingan antar negara pada kawasan regional maupun internasional menumbuhkan kerjasama antar negara maupun antar lembaga dalam pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Di sisi yang lain juga menumbuhkan kesadaran akan penting peningkatan kualitas pendidikan untuk menghadapi peningkatan persaingan antar bangsa di segala sendi kehidupan;
6. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang positif bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Berbagai riset dalam bidang pendidikan telah membawa peningkatan kualitas pendidikan melalui temuan-temuan inovatif dalam praktek pembelajaran. Selain itu pemanfaatan teknologi dalam praktek pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan.

7. Sebagai implikasi diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten dalam bidang pendidikan lebih berkonsentrasi pada pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. Dengan demikian urusan wajib pendidikan di kabupaten akan ditangani lebih optimal seiring dengan pengurangan tersebut.

Berikut ini disajikan beberapa Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara:

NO	ISU STRATEGIS	TANTANGAN	PELUANG
1	Masih Kurangnya Lembaga PAUD (TK, KB, SPS dan TPA) dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam menitipkan anak pada lembaga PAUD	Belum tersebarnya secara merata Lembaga PAUD di kecamatan/desa	Membangun Lembaga PAUD sesuai dengan Permendikbud no 18 Tahun 2018 dan mengoptimalkan Lembaga PAUD yang telah ada
2	Jumlah Tenaga Pendidik Belum sesuai dengan latar belakang akademik pendidikan PAUD	Masih kurangnya tenaga pendidik PAUD yg Lulusan D-IV/S1 PAUD	Memberi beasiswa bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan ke D-IV/S1 PAUD
3	Kurangnya inovasi Guru dalam proses belajar mengajar pada setiap jenjang satuan pendidikan	Masih kurangnya kemampuan/kompetensi Guru dalam mengajar	Melakukan diklat/workshop kepada guru, dan MGMP/KKG/PKG
4	Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran PAUD (TK, KB, SPS dan TPA)	Belum terpenuhinya sentra-sentra pada lembaga PAUD	Menyediakan sentra-sentra PAUD
5	Kualifikasi Akademik yang belum sesuai dengan SPM	Masih kurangnya tenaga pendidik PAUD yg Lulusan D-IV/S1 PAUD	Memberi beasiswa bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan ke D-IV/S1
6	Sarana dan prasarana pendukung belum memadai (Mes Guru, Toilet, Mobiler Perpustakaan, mobiler ruang guru dan kepek)	Keterbatasan anggaran	Mengupayakan anggaran dari sumber lain (Prov/pusat)
7	Belum semua sekolah memiliki Perpustakaan, Laboratorium Sains dan sarana ibadah jenjang SD	Keterbatasan anggaran	Mengupayakan anggaran dari sumber lain (Prov/pusat)
8	Rendahnya manajemen Kepala sekolah pada satuan pendidikan formal dan nonformal	Kurangnya minat kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan	Mendorong kepala sekolah untuk mengikuti diklat/workshop
9	Kualifikasi guru 5% belum memenuhi SPM jenjang SD	Faktor usia	Pengalihan ke struktural

10	Terjadinya Penumpukan tenaga pendidik di beberapa sekolah (Mapel Agama dan IPA) jenjang SMP	Kurang tersebarnya guru mata pelajaran	Melakukan pemetaan guru dan menenpatkan guru sesuai kebutuhan sekolah
11	Kurangnya sarana dan prasarana khususnya pada lab dan perpustakaan serta mobiler lainnya jenjang SMP	Keterbatasan anggaran	Mengupayakan anggaran dari sumber lain (Prov/pusat)
12	Kurangnya sarana penunjang untuk pelaksanaan UNBK pada satuan pendidikan formal dan nonformal	Keterbatasan anggaran	Mengupayakan anggaran dari sumber lain (Prov/pusat)
13	Akreditasi satuan pendidikan formal dan nonformal	Minimnya pengetahuan kepala sekolah terhadap pentingnya akreditasi	Melaksanakan Bimtek tentang Akreditasi
14	Rendahnya prestasi peserta didik	Kurangnya minat dan bakat belajar peserta didik	Memperbanyak kompetisi peserta didik antar sekolah
15	Kurangnya nilai moral peserta didik	Rendahnya karakter peserta didik	Meningkatkan pendidikan keagamaan disatuan pendidikan

B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

BAB III berisi:

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah*
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH & WKDH Terpilih*
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian*
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS*
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis*

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 untuk bidang pendidikan, prioritasnya ditekankan pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan. Sejumlah keberhasilan telah berhasil diraih dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan baik pada tataran nasional, regional maupun tingkat kabupaten khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara. Meskipun demikian sejumlah permasalahan masih menghadang dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Tenggara.

Permasalahan tersebut mendesak untuk segera dicarikan solusinya, terutama berkaitan dengan kesiapan untuk memasuki tahap ketiga pembangunan pendidikan nasional yang berfokus pada peningkatan daya saing regional.

Dari hasil identifikasi berbagai permasalahan pendidikan dalam Forum Perangkat Daerah *stake holder* pendidikan dan juga Dewan Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara berhasil diidentifikasi sejumlah isu-isu strategis atau permasalahan utama pada urusan wajib dibidang pendidikan. Isu-isu strategis atau permasalahan utama yang teridentifikasi diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017-2022.

Isu-isu strategis atau permasalahan utama yang dimaksud adalah sebagai berikut :

3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang pendidikan

- 1) Masih kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah;
- 2) Belum maksimalnya penataan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut pemilahan kelompok usia (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Paud Sejenis, dan Taman Kanak-Kanak)
- 3) Belum semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki sertifikat sesuai kompetensinya;
- 4) Penyebaran tenaga pendidik masih belum merata khususnya untuk daerah 3T (Terpencil, terluar dan terisolir);
- 5) Masih rendahnya APK di tingkat pendidikan menengah;
- 6) Rendahnya kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di tingkat PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 7) Belum dilaksanakannya secara optimal pendidikan keorangtuaan/pendidikan keluarga sebagai implementasi kebijakan nasional;
- 8) Belum semua siswa (SD/SMP) dari keluarga miskin mendapatkan Penanda Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai syarat penerima manfaat dari Program Indonesia Pintar yang merupakan Program Nasional pengentasan kemiskinan;
- 9) Status tanah SD Negeri yang sebagian besar milik Pemerintah Desa, ditengarahi tanah yang digunakan sekolah juga ada hasil tukar guling antara masyarakat dengan pemerintah desa sehingga berpotensi menimbulkan sengketa.

3.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang kebudayaan

- 1) Masih rendahnya pelestarian dan aktualisasi nilai budaya dalam rangka penyelamatan aset budaya tak benda;
- 2) Masih rendahnya pelestarian dan penyelamatan aset benda-benda sejarah dan budaya;
- 3) Tidak adanya wadah penyimpanan/pelestarian benda-benda purbakala (museum);
- 4) Minimnya pelestarian cagar sejarah dan budaya;

- 5) Minimnya referensi sejarah, budaya, bahasa, seni dan adat istiadat suku alas dan gayo aceh tenggara;
- 6) Masih minimnya sarana dan prasarana kesenian modern dan tradisional;
- 7) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan organisasi dan SDM pada seni budaya daerah;
- 8) Tidak adanya desa adat sebagai pilot projek pelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat suku alas dan gayo aceh tenggara.
- 9) Rendahnya nilai kreatifitas masyarakat dalam melestarikan dan memproduksi benda-benda tradisional daerah;
- 10) Minimnya lembaga pelestari nilai-nilai seni dan budaya

Sebagaimana daerah lainnya dalam Wilayah Republik Indonesia, pendidikan formal yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara dimulai dari pendidikan pra-sekolah (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), Pendidikan pra-sekolah bertujuan untuk mengembangkan fisik, afektif, dan kognitif anak. Pendidikan ini dikelola oleh pemerintah dan swasta. Pendidikan dasar dikelompokkan ke dalam kelas dasar 6 tahun (kelas 1-6). Pendidikan menengah meliputi sekolah menengah pertama 3 tahun (kelas VII-IX).

Pendidikan non-formal yang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, meliputi pembelajaran Paket A (setara sekolah dasar), Paket B (setara sekolah lanjutan tingkat pertama), Paket C (setara sekolah lanjutan tingkat atas), kegiatan belajar masyarakat, kegiatan belajar usaha, kursus keterampilan, program pemberantasan buta aksara, kegiatan magang kelompok usaha, pelatihan keterampilan anak putus sekolah, dan program satuan pendidikan nonformal (SPNF).

Dari uraian diatas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dapat melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

No	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				INTERNAL Pelayanan SKPD (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
	JENJANG PAUD					
1	Membangun Lembaga PAUD, Melakukan sosialisasi kemasyarakatan tentang pentingnya PAUD	50%	SPM Pendidikan	Bidang PAUD dan DIKMAS		- Masih Kurangnya Lembaga PAUD, Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam menitipkan anak pada lembaga PAUD
2	Pengadaan APE (Alat Permainan Educatif)	50%	SPM Pendidikan	Bidang PAUD dan DIKMAS		Siswa merasa bosan dengan permainan seadanya, diperlukan penambahan sarana bermain
3	Melakukan perekrutan tenaga pendidik sesuai akademik PAUD	20%	SPM Pendidikan	Bidang PAUD dan DIKMAS		Jumlah Tenaga Pendidik Belum sesuai dengan latar belakang akademik pendidikan PAUD
4	Pengadaan Referensi satuan PAUD dan DIKMAS	60%	SPM Pendidikan	Bidang PAUD dan DIKMAS		Keterbatasan referensi bahan ajar guru/siswa membuat aktifitas belajar kurang maksimal
5	Pengadaan Mobiler satuan PAUD dan DIKMAS	40%	SPM Pendidikan	Bidang PAUD dan DIKMAS		Siswa merasa bosan dengan permainan seadanya, diperlukan penambahan sarana bermain
6	Mengadakan diklat berjenjang guru PAUD	40%	SPM Pendidikan	Bidang PAUD dan DIKMAS		Kurangnya Kualitas Guru dalam mengajar
7	Kerjasama dengan Perguruan tinggi terkait	30%	SPM Pendidikan	Bidang PAUD dan DIKMAS		Kualifikasi Akademik yang belum sesuai dengan SNP
8	Pemetaan Tenaga Pendidik	60%	SPM Pendidikan	Bidang PAUD dan DIKMAS		Kurangnya Tenaga Pendidik di beberapa PAUD
9	Pengadaan sarana satuan PAUD dan DIKMAS	30%	SPM Pendidikan	Bidang PAUD dan DIKMAS		Sarana yang belum memadai

JENJANG SD						
10	Pengadaan sarana dan prasarana	60%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SD		Sarana dan prasarana yang belum memadai
11	Pelatihan Karakter bagi Kepala Sekolah dan guru, serta pembinaan karakter bagi siswa	60%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SD		Sekolah belum menerapkan pendidikan karakter bangsa
12	Pelatihan PAKEM bagi guru	40%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SD		Proses belajar mengajar masih konvensional
13	Pemberian Beasiswa Miskin	10%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SD		banyaknya Siswa Miskin Putus Sekolah
14	Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	40%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SD		Rendahnya manajemen Kepala sekolah
15	Di angkatnya Pegawai TU di SD	0%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SD		Semua ADM Sekolah dikerjakan oleh kepala sekolah
16	Pelatihan Informasi Komunikasi dan Teknologi (ICT) bagi guru dan kepala sekolah	40%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SD		kurang kemampuan menggunakan ICT pada pembelajaran
17	Pemetaan dan Pemerataan Guru	80%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SD		Keterbatasan Guru PNS di sekolah
JENJANG SMP						
26	Pemetaan dan perekrutan Tenaga Pendidik (Membuka farmasi tenaga guru yang Kurang)	50%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Terjadinya Penumpukan tenaga pendidik di beberapa sekolah
27	Pengadaan sarana / Mobiler di setiap sekolah	50%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Kurangnya sarana dan prasarana khususnya pada lab dan perpustakaan serta mobiler lainnya
28	Pengadaan buku/bahan ajar di setiap	30%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan		Siswa tidak dapat menerima pelajaran dengan maksimal

	sekolah			SMP		
29	Pengadaan sarana Lab di setiap sekolah	30%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Siswa tidak dapat melaksanakan praktik pelajaran dengan maksimal
30	Kerjasama dengan Perguruan tinggi terkait	60%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Kualifikasi Akademik yang belum sesuai dengan SNP
31	Pengadaan sarana ruang produktif/keterampilan SMK		SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Ruang Produktif yang tidak memadai
32	Penambahan Pengadaan Sarana dan Alat TIK	30%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Penguasaan TIK kurang
33	Pelatihan tentang Penguasaan Sarana dan Alat TIK bagi Guru		SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Banyak guru yang belum menguasai ICT
34	Volume Pelatihan Kepala Sekolah untuk MBS perlu ditingkatkan	30%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Pelatihan Kepala Sekolah kurang
35	Penambahan Pengadaan Sarana Gedung Perpustakaan		SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Pengadaan Sarana Gedung Perpustakaan belum memadai
36	Mengadakan Sosialisasi tentang Peningkatan Kinerja Pengawas	70%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Rekrutmen Pengawas tidak sesuai standar
37	Volume Pelatihan Pengawas untuk Pembinaan ke masing-masing Satuan Pendidikan perlu ditingkatkan		SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		
38	Pemetaan dan perekrutan Tenaga Pendidik (Membuka farmasi tenaga guru yang Kurang)	50%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Terjadinya Penumpukan tenaga pendidik di beberapa sekolah
39	Kerjasama dengan Perguruan tinggi terkait	60%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Kualifikasi guru 45% belum memenuhi SPM

40	Perlu adanya Pelatihan bagi Guru sesuai dengan Bidang yang diampunya	60%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Pelatihan Kompetensi Guru masih kurang
41	Peran Kepengawasan perlu ditingkatkan	70%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Kedisiplinan Guru masih rendah
42	Pemberian Penghargaan (reward) terhadap Guru berprestasi dan Pemberian Vonisemen terhadap Guru yang indisipliner		SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		
43	Membuka formasi untuk guru produktif	25%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Kurangnya Guru Produktif sehingga hanya memanfaatkan guru yang tidak berlatarbelakang akademik kejuruan (Guru Produktif)
44	Pengadaan sarana / Mobiler di setiap sekolah	50%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Kurangnya sarana dan prasarana khususnya pada lab dan perpustakaan serta mobiler lainnya
45	Pengadaan buku/bahan ajar di setiap sekolah	30%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Siswa tidak dapat menerima pelajaran dengan maksimal
46	Pengadaan sarana Lab di setiap sekolah	30%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Kurangnya sarana dan prasarana khususnya pada lab
47	Penambahan Pengadaan Sarana dan Alat TIK	30%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Penguasaan TIK kurang
48	Pelatihan tentang Penguasaan Sarana dan Alat TIK bagi Guru		SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		
49	Volume Pelatihan Kepala Sekolah untuk MBS perlu ditingkatkan	70%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Pelatihan Kepala Sekolah kurang
50	Penambahan Pengadaan Sarana Gedung Perpustakaan		SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		

51	Pengadaan Gedung RPS untuk Pelajaran Produktif	25%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Perluasan Akses
52	Pengadaan Peralatan Praktek untuk Pelajaran Produktif		SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		
53	Pengadaan Buku Pegangan Siswa untuk Mata Pelajaran Produktif		SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		
54	Mengadakan Sosialisasi tentang Peningkatan Kinerja Pengawas	70%	SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		Rekrutmen Pengawas tidak sesuai standar
55	Volume Pelatihan Pengawas untuk Pembinaan ke masing-masing Satuan Pendidikan perlu ditingkatkan		SPM Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP		

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Tenggara, Visi pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara yang ingin diwujudkan pada periode 2017- 2022 adalah:

VISI :
" MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA YANG RELIGIUS, BERBUDAYA, MANDIRI, UNGGUL DAN SEJAHTERA "

Untuk melaksanakan Misi tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah menetapkan **MISI** jangka menengah untuk lima tahun ke depan (2017–2022), yaitu :

- 1) Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif;
- 2) Tersedianya infrastruktur publik yang memadai dan efektif;
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan yang bermutu bagi masyarakat serta memberikan fasilitas dan pembinaan semua cabang olahraga sebagai upaya kesehatan dan prestasi generasi muda ;
- 4) Peningkatan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
- 5) Menumbuh kembangkan perekonomian rakyat, menuju kedaulatan sumber daya alam yang berkarakter;
- 6) Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari;
- 7) Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil dan pro rakyat;
- 8) Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat;
- 9) Tersedianya kebutuhan masyarakat petani yang cukup dan memadai;
- 10) Terwujudnya rumah sehat bagi warga miskin dan santunan kematian bagi masyarakat.

a. Misi Pertama: Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif

Tujuan dari misi ini adalah:

- Meningkatkan profesionalisme pemerintah daerah dalam tugasnya melayani masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.

- Mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara sehingga dihasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja.
- Mendukung dan mendorong pengembangan inovasi aparatur pemerintah daerah berdasarkan regulasi yang ada.
- Penghargaan terhadap aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan memiliki inovasi yang tinggi.
- Mendorong dan mendukung penggunaan aplikasi system informasi yang modern untuk menciptakan transparansi pengelolaan pemerintah, terbuka dan teratur.
- Terciptanya pusat informasi pelayanan publik dan sumber data yang memberikan informasi terbaru dan terbuka serta terukur untuk penerapan e-government.

b. Misi Kedua: Tersedianya infrastruktur publik yang memadai dan efektif.

1. Peningkatan jaringan jalan untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi aktivitas masyarakat dan dunia usaha;
2. Meningkatkan koneksitas jaringan transportasi sebagai bentuk pelayanan transport;
3. Mewujudkan sarana dan prasarana dasar wilayah disesuaikan dengan prinsip keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan inovasi terhadap ketersediaan dan pemenuhan air minum/baku bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Meningkatkan sistem sanitasi dan drainase diseluruh wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Memberikan fasilitas olah raga, seni dan budaya sebagai wadah ekspresi generasi muda Aceh Tenggara;
7. Meningkatkan sistem penanggulangan bencana.

c. Misi Ketiga: Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Bermutu Bagi Masyarakat.

1. Menjamin pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Mengembangkan dan menerapkan inovasi program kesehatan khususnya bagi warga miskin (berpenghasilan rendah).
3. Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis yang profesional.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan di setiap puskesmas Kecamatan.

d. Misi Keempat: Peningkatan Mutu Pendidikan Yang Memiliki Daya Saing.

1. Memberikan beasiswa penuh bagi siswa berprestasi dan berpotensi;
2. Pengembangan pendidikan non formal dilakukan sampai ketinggian pemerintahan terkecil dengan membuka ruang belajar bagi masyarakat umum, untuk pengembangan keterampilan (life skill) dan menekan angka buta huruf.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru (pendidik).
4. Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas tinggi.

e. Misi Kelima: Menumbuh kembangkan perekonomian rakyat, menuju kedaulatan sumber daya alam yang berkarakter.

1. Meningkatkan dan mengembangkan industry kecil dan menengah (UMKM) sebagai basis perekonomian rakyat;
2. Membuka dan mengembangkan akses pemasaran hasil industry UMKM yang lebih luas;
3. Eksplorasi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan peningkatan kualitas produksi industry dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup;
4. Mengembangkan inovasi teknologi terhadap proses produksi;

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelaku industry dan perekonomian rakyat untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan;
6. Mendorong tumbuh dan berkembangnya dunia usaha mikro sebagai basis peningkatan perekonomian rakyat;
7. Membentuk dan mengaktifkan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pertanian sebagai upaya stabilitas harga panen dan memberikan nilai tambah dari produk masyarakat untuk dijual keluar daerah;
8. Menyediakan aksesibilitas dan sistem terhadap lembaga keuangan untuk pengembangan usaha mikro.

f. Misi Keenam : Memperkokoh Kerukunan Kehidupan Beragama dan Budaya Yang Lestari.

1. Menumbuh kembangkan toleransi kehidupan beragama masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Menciptakan suasana anti diskriminasi;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sosial budaya;
4. Meningkatkan budaya gotong royong;
5. Meningkatkan produksi dan apresiasi dibidang agama, seni dan budaya tradisional;
6. Meningkatkan potensi budaya sebagai dasar untuk memperkuat karakter bangsa dan kesatuan NKRI;
7. Mengoptimalkan dan menggali kearifan local dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta asset kesenian dan budaya local;
8. Melakukan pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya local dan meningkatkan jumlah kearifan local yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah;

9. Mengandeng pemuda dalam mempertahankan, mengembangkan kekayaan budaya yang ada di Aceh Tenggara dari semua suku etnis sebagai kekayaan sosial Aceh Tenggara;
10. Membentuk dan mengembangkan komunitas pemuda dalam kegiatan religius olah raga dan budaya.

g. Misi Ketujuh: Menciptakan Dunia Usaha dan Investasi Yang Adil dan Pro Rakyat.

1. Terciptanya sistem untuk mendukung kemudahan dan percepatan investasi untuk mendukung perkembangan dan kemajuan usaha perekonomian kerakyatan;
2. Menciptakan kemudahan dan percepatan proses perijinan investasi;
3. Menciptakan iklim investasi yang pro rakyat yang kondusif;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung investasi dan pemasaran;
5. Pemerataan investasi untuk pengembangan potensi perdesaan dan masyarakat desa;
6. Menciptakan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyeimbang usaha investasi.

h. Misi Kedelapan : Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Menuju Peningkatan Ekonomi Rakyat.

1. Mengembangkan tujuan wisata dan destinasi wisata;
2. Meningkatkan akses infrastruktur dan pemasaran bidang pariwisata ditingkat local, regional dan nasional;
3. Meningkatkan sistem manajemen dan pengelolaan wisata melibatkan peran aktif masyarakat dan kelompok masyarakat penggiat pariwisata;
4. Meningkatkan investasi dibidang pariwisata dan kebudayaan local.

i. Misi Kesembilan : Tersedianya Kebutuhan Petani Yang Cukup dan Memadai.

1. Mengembangkan dan pemanfaatan teknologi modern dan tepat guna dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan;
2. Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan;
3. Meningkatkan dan memperbaiki sistem pemasaran hasil pertanian dan perikanan melalui pengembangan koperasi dan kelompok petani;
4. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan pertanian dan perikanan;
5. Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian petani;
6. Mewujudkan kawasan agropolitan untuk mendukung keberhasilan agroindustri;
7. Mewujudkan kawasan minapolitan untuk mendukung kemajuan industry perikanan.

j. Misi Kesepuluh : Terwujudnya Rumah Sehat Bagi Warga Miskin dan Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.

1. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui program perbaikan rumah dan pengentasan lingkungan permukiman kumuh;
2. Meningkatkan jumlah rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman;
4. Memberikan santuan kematian bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Aceh Tenggara Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu Program dan Kegiatan pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016-2021 mengacu pada sasaran strategis Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019. Adapun sasaran strategis pada Renstra Kemendikbud 2015-2019 dapat diuraikan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Tabel 3.3. Sasaran Strategis Renstra Kemendikbud 2015-2019

No	Sasaran Strategis	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
1	Meningkatnya perilaku positif siswa	IKSS 2	Indeks Integritas siswa SMP/SMPLB sebesar 77 dan SMA/SMALB/SMK sebesar 78
2	Meningkatnya akses PAUD dan Dikmas di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	IKSS 7	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,70%
		IKSS 8	Sejumlah minimal 54,60% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif
		IKSS 9	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi sebanyak 7.871 lembaga
		IKSS 10	Angka melek aksara penduduk usia dewasa di

			atas 15 tahun sekurangkurangnya 96,10%
		IKSS 11	Sejumlah minimal 15,60% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)
SS6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	IKSS 12	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%
		IKSS 13	APM SD/SDLB sekurangkurangnya 85,20%
		IKSS 14	APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang - kurangnya 83,77%
		IKSS 15	APM SMP/SMPLB sekurang- kurangnya 73,72%
		IKSS 16	APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71 %
		IKSS 17	APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50%
		IKSS 20	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun
SS7	Meningkatnya mutu PAUD dan Dikmas yang berwawasan	IKSS 21	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak

	gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan		42.926 lembaga
		IKSS 22	Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI sebanyak 71,38%
SS8	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	IKSS 32	Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6.5
		IKSS 33	Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6.5
		IKSS 34	Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7.0 dan UN SMK minimal 7.0
SS10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	IKSS 41	Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 87.417 lembaga
SS11	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan & pemanfaatan serta diplomasi budaya utk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yg memiliki ketahanan budaya	IKSS 42	Indeks Pembangunan Kebudayaan nasional mencapai katagori sedang (skor 37)

Berikut ini akan disajikan telaahan terhadap Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan isu strategis yang harus dicapai secara Nasional.

Visi Kemendiknas 2015-2019

“ Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotongroyong “

Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah layanan pendidikan yang:

- (1) tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara;
- (2) **terjangkau** oleh seluruh lapisan masyarakat;
- (3) **berkualitas/bermutu dan relevan** dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
- (4) **setara** bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, dan sebagainya; dan
- (5) menjamin **kepastian** bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan
menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Untuk mencapai visi Kemendiknas 2015, Misi Kemendiknas 2015 - 2019 dikemas dalam ”**Misi 5K**” sebagai berikut.

M1 Meningkatkan **Ketersediaan** Layanan Pendidikan

M2 Meningkatkan **Keterjangkauan** Layanan Pendidikan

M3 Meningkatkan **Kualitas/Mutu dan Relevansi** Layanan Pendidikan

M4 Meningkatkan **Kesetaraan** dalam Memperoleh Layanan Pendidikan

M5 Meningkatkan **Kepastian/Keterjaminan** Memperoleh Layanan Pendidikan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sistem pendidikan, khususnya di Provinsi Aceh, sebelum reformasi bersifat elitis, kurang relevan dengan kebutuhan pembangunan, gagal memenuhi kebutuhan dan kepentingan mayoritas rakyat atau pemerataan pendidikan, dan munculnya persoalan ekuitas. Karena itu, reformasi di bidang pendidikan menuntut:

- 1) Agar seluruh rakyat dapat benar-benar memperoleh pendidikan secara nyata dan layak;
- 2) Pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kearah warga Negara yang produktif; dan
- 3) Fondasi akademik yang mantap untuk mampu menguasai berbagai keterampilan kejuruan dan teknis.

Untuk merespon terhadap tuntutan perubahan itu, perlu secara terus menerus diadakan pertemuan dengan praktisi pendidikan (guru, kepala sekolah), pejabat-pejabat eksekutif dan legislatif, serta ahli/praktisi pendidikan dengan tujuan untuk membahas dan mengkaji lebih dalam tentang berbagai isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan seperti :

- 1) Hal-hal yang berkenaan dengan perbaikan sistem pengelolaan administrasi pendidikan dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat sekolah;
- 2) Aspek-spek pengembangan dan reformasi kurikulum;

Penetapan berbagai kebijakan pendidikan, misalnya : pemberian kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat tanpa deskriminasi; pendidikan harus mampu memperkuat kesatuan bangsa dan pembangunan ekonomi; dan pendidikan harus mampu membekali para lulusan dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam berbagai sektor kehidupan.

Terkait dengan kajian atas rencana tata ruang wilayah dan lingkungan hidup strategis, dalam RPJMD Kabupaten Aceh Tenggara 2017-2022 dikembangkan kebijakan umum yang terkait dengan masalah kewilayahan. Rencana Tata Ruang

Wilayah (RT/RW) Kabupaten Aceh Tenggara disusun berdasarkan azas penataan ruang yang tertuang pula pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu :

- a) Keterpaduan;
- b) Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c) Keberlanjutan;
- d) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e) Keterbukaan;
- f) Kebersamaan dan kemitraan;
- g) Perlindungan Kepentingan Umum;
- h) Kepastian Hukum dan Keadilan; dan
- i) Akuntabilitas. Pada prinsipnya, RT/ RW Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana yang dirumuskan di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan rumusan keinginan dan harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara terhadap situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan fisik yang terjadi dan berkembang di dalam wilayahnya.

3.5. Penentuan isu-isu Strategis

Berikut ini merupakan isu-isu yang menjadi perhatian khusus bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara:

NO	ISU STRATEGIS
1	Masih Kurangnya Lembaga PAUD dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam menitipkan anak pada lembaga PAUD (170 lembaga yang ada dari 193 yang seharusnya)
2	Jumlah Tenaga Pendidik Belum sesuai dengan latar belakang akademik pendidikan PAUD
3	Kurangnya Kualitas Guru dalam mengajar
4	Masih Kurang Lembaga TK dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam menitipkan anak pada lembaga TK
5	Kurangnya Tenaga Pendidik di beberapa TK
6	Jumlah Tenaga Pendidik Belum sesuai dengan latar belakang akademik pendidikan TK
7	Kualifikasi Akademik yang belum sesuai dengan SPM

8	Sarana dan prasarana yang belum memadai (Mes Guru, Toilet, Mobiler Perpustakaan, mobiler ruang guru dan kepek)
9	Belum semua sekolah memiliki Perpustakaan dan Laboratorium Sains SD
10	Rendahnya manajemen Kepala sekolah
11	Kurangnya sarana dan prasarana khususnya pada lab dan perpustakaan serta mobiler lainnya
12	Kualifikasi Akademik yang belum sesuai dengan SPM
13	Kualifikasi guru 35% belum memenuhi SPM
14	Terjadinya Penumpukan tenaga pendidik di beberapa sekolah (Pel Agama, Biologi, PKn, dan Fisika)
15	Kurangnya sarana dan prasarana khususnya pada lab dan perpustakaan serta mobiler lainnya

B A B IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara

BAB IV berisi:

4.1. Tujuan dan Sasaran

Jangka Menengah

Tujuan strategis Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017 – 2022 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan terhadap masyarakat yang cerdas, kompetitif, sejahtera dan bermartabat pada tahun 2018,

sebagaimana yang dikehendaki dalam rumusan visi dan dengan memperhatikan rumusan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan demikian, tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
				5	6	7	8	9
1	Meningkatkan mutu pendidikan yang berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Hasil Pendidikan.	Angka Melek Huruf	96,5	97	97,5	98	98,5
			Harapan Lama Sekolah	13,97	13,98	13,99	14,00	14,00
		Meningkatnya kualitas sarana pendidikan.	Persentase Sekolah yang Terakreditasi	60	75	85	95	100
		Meningkatnya kualitas tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang lulus uji kompetensi	75	78	80	82	85

B A B V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022.

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 5. 1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif

MISI : Peningkatan mutu pendidikan yang memiliki daya saing.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan mutu pendidikan yang berdaya saing.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kualitas Hasil Pendidikan. • Meningkatkan kualitas pendidikan. • Meningkatkan kualitas tenaga Kependidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Melek Huruf • Harapan Lama Sekolah • Persentase Sekolah yang Terakreditasi • Persentase Guru yang lulus uji kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan standar pengendalian yang akuntabel • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna

B A B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1.

Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan.

Tabel. 6.1
Rencana Program dan Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
							Tahun Transisi (2017)		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									2018		2019		2020		2021		2022		Tahun 2022	
							target	Rp.	target	Rp. (dalam ribuan)	target	Rp. (dalam ribuan)	target	Rp. (dalam ribuan)	target	Rp. (dalam ribuan)	target	Rp. (dalam ribuan)	target	Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
L		01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi																
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100			75	1.528.310	80	4.480.000	85	3.820.000	90	2.230.000	95	2.340.000	95	2.350.000
			1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Terlaksananya sarana dan prasarana pendidikan	%	100			100	1.320.950	100	1.500.000	100	1.500.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000
			2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terakomodirnya sarana dan prasarana kantor	%	100			100	207.360	100	500.000	100	600.000	100	150.000	100	250.000	100	250.000

			3	Pengadaan Lahan di Kec.Leuser	Terlaksananya sarana dan prasarana pendidikan	%	100				100	700.000									
			4	Pengadaan Lahan SMPN 1 Lawe Bulan	Terlaksananya sarana dan prasarana pendidikan	%	100				100	580.000	100	520.000							
			5	Pengadaan Lahan SDN Deleng Pokhisen	Terlaksananya sarana dan prasarana pendidikan	%	100				100	580.000	100	520.000							
			6	Penyusunan Renja / Renstra	Tersusunnya Renja / Renstra	%	100				100	70.000	100	80.000	100	80.000	100	90.000	100	100.000	
			7	Pengadaan Mobil Operasional Pengawasan Proses Belajar Mengajar	Bertambahnya Fasilitas pengawas Sekolah dalam Melaksanakan Tugas	%	100				100	550.000									
			8	Rehabilitasi Gedung P3G Babussalam dan Kantin		1	Paket						100	400.000							
			9	Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung Kantor Dikbud		1	Paket						100	200.000							

		03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100		100	4.681.150	100	9.059.226	100	6.392.000	100	2.458.000	100	2.555.000	95	2.720.000	
			1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Meningkatnya Koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	%	100		100	280.500	100	400.000	100	450.000	100	500.000	100	550.000	100	550.000
			2	Tunjangan berdasarkan kinerja	Peningkatan Pelayanan Aparatur	1	Keg				100	1.200.000								
			3	Pengadaan Website sistem informasi pendidikan	Terinformasinya sistem informasi pendidikan secara online	1	Keg				100	350.000	100	350.000	100	400.000	100	400.000	100	550.000
			4	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah SD/SMP	Terakritisnya sekolah SD/SMP	1	Keg				100	150.000	100	150.000	100	175.000	100	200.000	100	200.000
			5	Pembuatan Profil Pendidikan	Terpusatnya data penunjang pendidikan	1	Keg		100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	180.000	100	200.000	100	200.000
			6	Biaya Operasional sekolah Negeri (BOS KAB)	Terlaksannya operasional sekolah Negeri	1	Keg		100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000						
			7	Pengelolaan aneka tunjangan	Terealisasinya tunjangan terhadap pengelolaan	1	Keg				100	150.000	100	150.000						

			8	Bantuan bagi pelatihan prestasi guru (PPG)		1	Keg				100	308.676	100	310.000	100	310.000	100	300.000		
			9	Pengadaan Buku induk siswa	Terigisternya data induk siswa	1	Keg				100	500.000								
			10	Pengadaan LKS siswa		1	Keg				100	1.031.550								
			11	Operasional Daerah Khusus	Terbantunya operasional sekolah daerah khusus	1	Keg				100	500.000	100	500.000						
			12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan kelancaran tugas maupun Kegiatan Dinas	1	Keg		100	42.000	100	50.000	100	60.000	100	70.000	100	80.000	100	90.000
			13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Meningkatkan kelancaran tugas maupun Kegiatan Dinas	1	Keg		100	75.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000
			14	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatkan kelancaran tugas maupun Kegiatan Dinas	1	Keg		100	160.960	100	165.000	100	165.000	100	165.000	100	165.000	100	170.000
			15	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatkan kelancaran tugas maupun Kegiatan Dinas	1	Keg		100	31.546	100	32.000	100	32.000	100	33.000	100	33.000	100	33.000

			16	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatkan kelancaran tugas maupun Kegiatan Dinas	1	Keg		100	51.515	100	52.000	100	55.000	100	55.000	100	55.000	100	55.000
			17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatkan kelancaran tugas maupun Kegiatan Dinas	1	Keg		100	9.129	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	12.000	100	12.000
			18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan kelancaran tugas maupun Kegiatan Dinas	1	Keg		100	225.000	100	250.000	100	250.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000
			19	Penyediaan Makan dan Minum Pegawai	Meningkatkan kelancaran tugas maupun Kegiatan Dinas	1	Keg		100	155.500	100	160.000	100	160.000	100	160.000	100	160.000	100	160.000
		04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	%	100		100			100		100		100		100		100	
		05	Operasional Tim Sistem Layanan Terpadu Pendidikan (SLTP)	Peningkatan pelayanan pendidikan terpadu	%	100		100	100.000		100	100.000	100	170.000	100	180.000	100	590.000	100	640.000

			1	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksanannya sistem pelaporan kinerja dan keuangan dinas pendidikan dan kebudayaan	1	Keg			100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	500.000	100	550.000	
			2	Koordinasi/ Fasilitas Penyusunan Renstra	Terkoordinirnya sasaran dan tujuan serta strategi dinas pendidikan	1	Keg						100	70.000	100	80.000	100	90.000	100	90.000	
		06		Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Angka Kelulusan Pendidikan Tingkat SD/MI dan SMP/MTs	%	100				97,63	572.491	97,67	580.000	97,69	600.000	97,69	650.000	100	650.000	
			1	Liga Pelajar Tingkat Sekolah Dasar Tahun 2019 (Sisa Lelang)	Terkoordinirnya sasaran dan tujuan serta strategi dinas pendidikan	1	Keg				100	572.491	100	580.000	100	600.000	100	650.000	100	650.000	
		07		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan Pendidikan Tingkat SD/MI dan SMP/MTs	%	94		97,61	1.391.259	97,63	46.049.705	97,67	75.413.110	97,69	77.822.500	97,69	81.630.000	100	80.980.000	
			1	Biaya Umum DAK	Peningkatan Kinerja Aparatur	1	Keg		100					450.000	100	450.000	100	500.000	100	550.000	
			2	Biaya Umum OTSUS	Peningkatan Kinerja Aparatur	1	Keg		100					450.000	100	450.000	100	500.000	100	550.000	

			3	Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional SD/MI dan SMP/MTs	Meningkatnya Pemahaman Siswa terhadap Mata Pelajaran Nasional	1	Keg				100	550.000	100	550.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000
			4	Operasional TIM Manajemen BOS	Terarahnya penggunaan Dana BOS	1	Keg		100	132.039	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	250.000	100	250.000
			5	Festival lomba seni siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Kabupaten	Meningkatnya daya tarik siswa terhadap seni	1	Keg				100	100.000	100	120.000	100	150.000	100	170.000	100	170.000
			6	Pelaksanaan US SD/MI Tahun Pelajaran 2019	Terkoordinirnya US SD/MI Tahun 2019	1	Keg		100	486.200	100	650.000	100	650.000	100	650.000	100	700.000	100	700.000
			7	Lomba cipta seni anak nasional (LCSAN) tingkat kabupaten	Terinspirasi siswa terhadap seni	1	Keg				100	100.000	100	120.000	100	120.000	100	150.000	100	150.000
			8	Olimpiade sain nasional (OSN) SD	Peningkatan Mutu Pendidikan	1	Keg		100	73.020	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	120.000	100	120.000
			9	Olimpiade olah raga siswa Nasional (O2SN) SD	Peningkatan Mutu Pendidikan	1	Keg				100	100.000	100	100.000	100	120.000	100	150.000	100	150.000

			10	Festival lomba seni siswa nasional (FLS2N) SD	Terinspirasi siswa terhadap seni	1	Keg				100	100.000	100	100.000	100	120.000	100	150.000	100	150.000	
			11	Lomba Cerdas Cermat Pai Tingkat SD	Peningkatan Mutu Pendidikan Dibidang PAI	1	Keg					500.000	100	500.000	100	550.000	100	570.000	100	580.000	
			12	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD/MI Tahun Pelajaran 2019	Menguji Kemampuan Peserta Didik	1	Keg					500.000	100	500.000	100	520.000	100	550.000	100	550.000	
			13	Pengadaan Naskah Ujian Sekolah, Pendistribusian dan Pencetakan LJK USM	Terpenuhinya Naskah Ujian Parap peserta didik	1	Keg					247.000	100	247.000	100	250.000	100	250.000	100	270.000	
			14	Pra Olimpiade Sain Nasional	Kemampuan Peserta Didik Dibiidang sain	1	Keg					266.738	100	270.000	100	270.000	100	290.000	100	290.000	
			15	Pra Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional	Kemampuan Siswa Dibiidang Olah Raga Di Tingkat Nasional	1	Keg					385.950	100	390.000	100	390.000	100	400.000	100	400.000	
			16	Pra Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional	Terseleksinya Siswa Dibiidang Seni dan Budaya	1	Keg					275.330	100	280.000	100	300.000	100	300.000	100	350.000	

			17	Seleksi Guru Kontrak Guru Kelas Sekolah Dasar	Kemampuan Guru Mengikuti Seleksi	1	Keg					35.125	100	35.500	100	35.500	100	400.000	100	400.000	
			18	Honor Guru Kontrak Kelas Guru SD	Terpenuhinya Guru Kelas SD	1	Keg					1.821.393	100	1.822.000	100	1.825.000	100	1.830.000	100	1.850.000	
			19	Try Out USBN SD/MI	Menguji Paras SiwaiDi bidang Pelajaran	1	Keg					477.180	100	480.000	100	500.000	100	500.000	100	530.000	
			20	Kursus Mahir Pembina Pramuka Tingkat dasar (KMD)	Terlaksananya Pembinaan Peramuka Tingkat dasar	1	Keg					110.000	100	110.000	100	150.000	100	150.000	100	170.000	
			21	Geladian Pimpinan Regu	Terukurnya Kemampuan Pimpinan Regu	1	Keg						100	210.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000	
			21	Pembangunan Pagar Sekolah SD Inpres Desa Lawe mantik	Terjaganya Keamann Dilingkungan Sekolah	1	Paket					200.000	100								
			22	Pengadaan Buku Penunjang SD Kab. Aceh Tenggara	Terpenuhinya Buku Penunjang Pada Sekolah Dasar	1	Paket					1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	

			23	Pengadaan Buku Penunjang SMP Kab. Aceh Tenggara	Terpenuhinya Buku Penunjang Pada Sekolah Mengah Pertama	1	Paket							1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.250.000	100	1.250.000	
			24	Pengadaan Buku Baca Tulis Alquran Kab. Aceh Tenggara	Terpenuhinya Baca Tulis Alquran Pada Siswa	1	Paket							1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	
			25	Pelaksanaan Ujian SMP/MTS	Pelaksanaa Ujian Akir Sekuloah Para Siswa	1	Keg							1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	
			26	Diskusi Publik Haru Guru	Terlaksan Diskusi Pada Haru Guru	1	Keg							631.930	100	635.000	100	635.000	100	640.000	100	640.000	
			27	Gala Siswa SMP Tahun 219	Tersenggara Gala Bagi Siwa	1	Keg							150.000	100	150.000	100	160.000	100	160.000	100	165.000	
			28	Olimpiade Guru Nasional (OGN) SMP	Terselenggaranya bagi Guru Untuk Mengikuti (OGN) Setingkat SMP	1	Keg							106.000	100	106.000	100	110.000	100	110.000	100	120.000	
			29	Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) SMP	Terselenggaranya Penelitia Bagi Siswa Dalam (OPSI)	1	Keg							157.950	100	160.000	100	160.000	100	165.000	100	165.000	

			30	Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) SMP	Terselenggaranya Olimpiade Siswa Dibidang (OLSN)	1	Keg												116.500	100	120.000	100	120.000	100	230.000	100	150.000	
			31	Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)	Terselenggaranya Memperingati Hari (Hardikdas)	1	Keg												106.000	100	110.000	100	115.000	100	115.000	100	120.000	
			32	Hari Pendidikan Daerah (Hardikda)	Terselenggaranya Memperingati (Hardikda)	1	Keg												106.000	100	106.000	100	110.000	100	115.000	100	120.000	
			33	Pembinaan Pra Olimpiade Nasional (OSN, FLS2N dan O2SN)SMP	Terselenggaranya Olimpiade Nasional OSN, FLS2N dan O2SN	1	Keg												780.100	100	790.000	100	800.000	100	800.000	100	800.000	
			34	Seleksi Guru Kontrak Bidang Setudi Jenjang SMP	Terpenuhi Guru Dibidang Study	1	Keg												923.543	100	925.000	100	927.000	100	930.000	100	950.000	
			35	Rehabilitasi Pembanguna RKB SMP 2 Lawe Sigala-Gala	Meningkatnya sarana Dan Prasaran Sekolah	1	Paket												1.000.000	100								
			36	Pembaguan Pagar SMP 5 lawe Sigala-Gala	Terpenuhinya Saran Dan Prasaran Sekolah	1	Paket												2.000.000	100								

			37	Pentas Pai Tingkat SD dan SMP	Terselenggaranya Pentas Pai Ditingkat SMP	1	Keg					500.000	100	500.000	100	530.000	100	550.000	100	550.000	
			38	MGMP Guru PAI SD dan SMP	Terselenggaranya MGMP Guru PAI SD dan SMP	1	Keg					200.000	100	220.000	100	250.000	100	250.000	100	260.000	
			39	Pengadaan Guru Kontrak Baca Tulis Al-Qur'an SD	Meningkatnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1	Keg					1.000.000	100	1.000.000	100	1.100.000	100	1.100.000	100	1.200.000	
			40	Olimpiade Guru Nasional SD	Meningkatnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1	Keg					88.720	100	90.000	100	100.000	100	100.000	100	110.000	
			41	Pengadaan Guru Kontrak Agama Kristen	Meningkatnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1	Keg					185.000	100	190.000	100	190.000	100	195.000	100	200.000	
			42	Seleksi Tenaga Pendidik Dan Pengawas Berprestasi	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	Keg					100.000	100	110.000	100	110.000	100	120.000	100	120.000	
			43	Olimpiade Guru Nasional SD	Meningkatnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1	Keg					60.000	100	75.000	100	85.000	100	90.000	100	95.000	

			44	Penilaian Angka Kredit Guru (PAK)	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	Keg					116.570	100	120.000	100	120.000	100	130.000	100	135.000	
			45	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Meningkatnya Fasilitas Belajar Mengajar	1	Keg					562.500	30	928.200	35	1.000.000	35	1.000.000	100	1.000.000	
			46	Pembangunan Taman, lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Meningkatnya Fasilitas Belajar Mengajar	%	100					2.642.342	100	4.980.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	
			47	pembangunan Gedung Sekolah	Meningkatnya Fasilitas Belajar Mengajar	%	100					7.284.734	100	15.500.000	100	16.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	
			48	Pengadaan Mobiler Sekolah	Meningkatnya Fasilitas Belajar Mengajar	%	100					1.400.000	100	2.600.000	100	2.700.000	100	2.800.000	100	1.800.000	
			49	Pengadaan Alat Praktek Siswa	Meningkatnya Fasilitas Belajar Mengajar	%	100					2.679.405	100	2.700.000	100	2.700.000	100	2.700.000	100	2.700.000	
			50	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	Terpenuhinya Saran Dan Prasaran Sekolah	%	100						100	1.202.672	100	1.300.000	100	1.300.000	100	1.300.000	

			51	Pembangunan Musholla	Terpenuhinya Saran Dan Prasarana Sekolah	%	100					100	1.500.000	100	1.500.000	100	1.500.000	100	1.500.000		
			52	Pengadaan Mobiler Guru	Meningkatnya Fasilitas Belajar Mengajar	%	100					700.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	
			53	Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu SD (DAK)	Meningkatnya Fasilitas Belajar Mengajar	%	100			100	6.149.665	100	11.855.908	100	12.500.000	100	13.000.000	100	13.000.000		
			54	Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu SMP (DAK)	Meningkatnya Fasilitas Belajar Mengajar	%	100			100	4.784.030	100	16.554.830	100	17.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000		
		08		Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	%	43,29		43,3	5.085.000	43,32	23.075.874	43,37	849.017.430	43,37	48.988.549	43,4	49.839.403	43,4	850.150.000	
					Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan	%	55														

			1	Monitoring dan Evaluasi Dana DAK PAUD	Terciptanya pengawasan yang akuntable	1	Keg					100	100.000	100	100.000	100	150.000	100	200.000	100	200.000	
			2	Penuntasan Buta Aksara	Temukutahirnya buta aksara	1	Keg					100	100.000	100	100.000	100	120.000	100	140.000	100	140.000	
			3	Pembangunan Pagar PAUD	Peningkatan sarana Pendidikan	1	Keg					100	500.000	100	550.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	
			4	Pembangunan RKB PAUD	Peningkatan sarana Pendidikan	1	Keg					100	640.000	100	700.000	100	700.000	100	860.000	100	860.000	
			5	Pembangunan TKN Pembina Lawe Sumur	Tersedianya Sekolah TKN Pembina Kec.Lawe Sumur	1	Paket							100	800.000.000					100	800.000.000	
			6	Rapat Koordinasi dan Pelantikan Bunda PAUD se Kab. Agara	Terkoordinirnya program serta kegiatan Bunda PAUD	1	Keg					100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	
			7	Gebyar Anak PAUD dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli	Terselenggaranya hari anak nasional	1	Keg					100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000	

			8	Pelatihan Jenjang Bagi Dasar Guru PAUD (TK dan KB)	Terlatihnya Guru PAUD	1	Keg					100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000		
			9	Pelatihan keterampilan kewirausahaan bidang menjahit untuk warga belajar SPNF/SKB		1	Keg					100	101.970	100	120.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000
			10	Bantuan Operasional TK Negeri berbasis IT (islam terpadu)		1	Keg					100	169.565	100	170.000	100	170.000	100	180.000	100	180.000
			11	Festival Kreativitas Siswa PAUD	Meningkatnya Kreativitas Siswa	1	Keg					100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000
			12	Pelatihan ICT Bagi Pengelola Satuan PAUD dan Dikmas	Meningkatnya Keahlian Pengelolaan PAUD	1	Keg					100	200.000	100	200.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000
			13	Perayaan Hari Aksara Internasional Ke-54	Meningkatnya Kesadaran Pentingnya Aksara	1	Keg					100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000
			14	Pembinaan Minat dan Bakat Kreativitas Siswa	Meningkatnya Kreativitas Siswa	1	Keg					100	1.950.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000

			15	Pelatihan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Meningkatnya standar kompetensi peserta didik	1	Keg				100	6.100.000	100	6.500.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	
			16	Pendidikan Keluarga (Parenting) 1000 HPK		1	Keg						100	480.000	100	500.000	100	530.000	100	530.000	
			17	Pemberian Makanan Tambahan untuk Siswa TK/PAUD		1	Keg					30	350.000	30	350.000	40	420.000	100	420.000		
			18	Pengadaan Mobiler Sekolah	Meningkatnya Fasilitas Belajar Mengajar	1	Keg				100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	
			19	Pengadaan Guru Kontrak PAUD (TK, KB, SPS dan TPA)	Meningkatnya Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	Keg				100	185.000	100	190.000	100	190.000	100	190.000	100	200.000	
			20	Diklat Jenjang Dasar Bagi Guru PAUD	Meningkatnya Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	Keg				100	95.644	100	100.000	100	100.000	100	120.000	100	120.000	
			21	Pengadaan Mobiler TK		1	Paket						100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	

		09	Program Pendidikan Non Formal	Persentase angka melek huruf	%	95			96,5		97	400.000	97,5	1.830.000	98	1.860.000	98,5	1.860.000	98,5	1.860.000	
			1 Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan Paket A dan B Tahap I dan II	Meningkatnya Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	Keg					100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	
			2 Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS)	Terdatanya data ATS	1	Keg					100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	
			3 Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer bagi Pendidikan Kesetaraan B dan C tahun Pelajaran 2019/2020	Masyarakat yang Putus Sekolah dapat melanjutkan ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi.	1	Keg						100	220.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000
			4 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BOP PAUD DAK Non Fisik	Termotivasinya lembaga PAUD dalam Pengembangan Potensi dan Kreativitas Anak PAUD	1	Keg						100	160.000	100	160.000	100	160.000	100	160.000	100	160.000
			5 Lomba Model Pembelajaran Menarik bagi Guru PAUD	Termotivasinya Guru PAUD dalam Desain model Pembelajaran menarik pada Satuan PAUD	1	Keg						100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000
			6 Bina Pendidikan Keluarga (BIDIKEL)	Terlaksananya Program Pendidikan keluarga di sekolah	1	Keg						100	450.000	100	450.000	100	450.000	100	450.000	100	450.000

				Kesetaraan A dan B																
			3	Pengadaan Blangko SKHU SMP/MTs dan SD/MI dan Pendidikan Kesetaraan A dan B	Tersedianya Blangko SKHU SD/MI dan SMP/MTs serta kesetaraan A dan B	1	Keg				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			4	Bantuan Operasional Sekolah Percontohan	Peningkatan Mutu Pendidikan	1	Keg				100	800.000	100	800.000	100	800.000	100	800.000	100	800.000
			5	Bantuan Operasional sekolah daerah khusus SD dan SMP	Peningkatan Mutu Pendidikan	1	Keg				100	200.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000
			6	BOS Kab. Tingkat SMP	Peningkatan Mutu Pendidikan	1	Keg				100	3.213.348	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000
			7	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	Terciptanya Database Akreditasi Sekolah	1	Keg				100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000
			8	Seleksi tenaga pendidik dan pengawas berprestasi	Peningkatan Mutu Pendidikan	1	Keg				100	300.000	100	300.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000

			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BOP PAUD DAK Non Fisik	Meningkatnya Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	Keg				100	98.447	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	
			18	Operasional Tim Manajemen BOS	Meningkatnya Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	Keg				100	147.329	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	
			19	Beasiswa SBMPTN	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	Keg				100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	
			20	Biaya Operasional Verifikasi Berkas SBMPTN	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	Keg				100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	
			21	Operasional Daerah Khusus	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	Keg				100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	
			22	Sosialisasi Pencegahan Korupsi, Gratifikasi dan Ceber Pungli	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Korupsi, Gratifikasi dan Ceber Pungli	1	Keg						100	120.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	
			23	Pelatihan Inventarisasi Aset Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1	Keg						100	260.000	100	260.000	100	260.000	100	260.000	

			24	Bantuan Bagi Guru Pelatihan Profesi Guru (PPG)		1	Keg					100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000		
			25	Pelatihan Inovator Guru SD dan SMP		1	Keg					100	220.000	100	220.000	100	220.000	100	220.000		
			26	Peringatan Hari Guru		1	Keg					100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000		
			27	Pengadaan Raport Siswa		1	Keg					100	200.000	100	220.000	100	220.000	100	220.000		
			28	Kartu Juara Siswa Agara (Siswa Berprestasi)		1	Keg					100	1.500.000	100	1.500.000	100	1.500.000	100	1.500.000		
		13	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya Angka Melek Huruf usia 15 - 24 tahun	%	n/a			80		82		85		90		95		95		
				Persentase angka partisipasi kasar (APK) SLB dan Layanan Khusus	%	n/a			80		85		90		95		100		100		
		14	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Persentase Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	%	n/a			55	181.620	65	3.753.999	75	10.546.000	85	10.535.000	95	10.585.000	95	10.585.000	

			1	Pengadaan Guru Kontrak PAUD (TK dan KB Lanjutan)	Terpenuhinya Guru PAUD	1	Keg				100	185.000	100	185.000	100	185.000	100	185.000	100	185.000
			2	Bimbingan Teknis Operator Dapodik satuan Pendidikan PAUD dan DIKMAS	Terpilihnya tenaga pendidik dan pengawas	1	Keg				100	100.000	100	150.000						
			3	Pengadaan Guru Kontrak Agama Islam dan Kristen	Terpenuhinya Guru Bidang Studi Agama	1	Keg		100	181.620	100	250.000								
			4	Pengadaan Guru Kontrak BTQ SD dan SMP	Terpenuhinya Guru BTQ SD dan SMP	1	Keg				100	1.000.000								
			5	Olimpiade Guru Nasional SD dan SMP tingkat Kabupaten	Terpilihnya guru yang berprestasi	1	Keg				100	150.000	100	150.000						
			6	Pelatihan Guru Bimbingan Konseling (BK) SMP		1	Keg				100	100.000	100	100.000						
			7	Uji Kompetensi Kepala Sekolah SD dan SMP	Meningkatnya Kemampuan Kepala Sekolah SD dan SMP	1	Keg				100	800.000	100	900.000	100	900.000	100	900.000	100	900.000

			15	Lomba Kemampuan Inovasi Mengajar menggunakan Media SD		1	Keg						100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000
			16	Bimtek Karya Tulis Ilmiah Guru SMP		1	Keg						100	236.000	100	240.000	100	240.000	100	240.000
			17	Workshop Pengawas Sekolah		1	Keg						100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000
			18	Workshop Kepala Laboratorium SMP		1	Keg						100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000
			19	Workshop Operator sekolah SMP		1	Keg						100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000
			20	Seleksi/Perekrutan Guru Kontrak (Guru Kelas) SD dan SMP		1	Keg						100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000
			21	Uji Kompetensi Kepala Sekolah TK,SD,SMP Negeri		1	Keg						100	475.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000
			22	Uji Kompetensi Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran SD/SMP		1	Keg						100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000

			23	Penguatan Kompetensi Guru Kelas dan mata pelajaran SD/SMP		1	Keg					100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	
			24	Workshop / Seminar Peningkatan Mutu Pendidikan	Terlaksananya Workshop / Seminar Peningkatan Mutu Pendidikan	1	Keg					100	200.000	100	200.000	100	250.000	100	250.000	
			25	TOT Guru Inti 4 Mapel yang di UN kan SMP	Terciptanya manajemen pendidikan yang bermutu	1	Keg					100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	
			26	TOT Guru Inti SD Kelas 4,5,6	Terciptanya manajemen pendidikan yang bermutu	1	Keg					100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	
			27	TOT Guru Penjas SD dan SMP	Terciptanya manajemen pendidikan yang bermutu	1	Keg					100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	
			28	Diklat Pustakawan SD / SMP	Tersedianya Petugas Perpustakaan yang Handal	1	Keg					100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	
			29	Pelatihan Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) Bagi Guru Belum Sertifikasi	Guru yang belum sertifikasi diharapkan segera lulus sertifikasi	1	Keg					100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	

			30	KMD Khusus Wali Kelas SMP	Meningkatnya Kemampuan KMD Wali Kelas	1	Keg					100	220.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000		
			31	KMD Khusus Guru PPK SMP	Meningkatnya Kemampuan KMD Guru PPK	1	Keg					100	220.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000		
			32	Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standard kompetensi jenjang SD / SMP		1	Keg					100	2.200.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000		
			15	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100			100		100		100		100		100			
			16	Program Peningkatan mutu pendidikan dasar	Persentase Rasio Guru Murid	Persen	22			22,1		22,2		22,3		22,4		22,5		22,5	
			17	Program Peningkatan mutu pendidikan menengah	Persentase Rasio Guru Murid	Persen	21			21,1		21,2		21,3		21,4		21,5		21,5	
			18	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah	Persen	87			89		90		92		94		95		95	

			1	Pengadaan Taman Baca dan															
		19	Program Pendidikan Vokasi	Persentase jumlah penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis	Persen	78,71		78,73		78,75		78,77		78,8		78,85		78,85	
		20	Program penguatan Syariat Islam sebagai nilai dalam internalisasi di dunia pendidikan	Persentase Sekolah yang melaksanakan kurikulum berbasis syariat	Persen	70		70		72		74		75		75		75	
		21	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkarakter Islami	Persentase Guru yang mengikuti peningkatan kemampuan Dasar Keislaman	Persen	72		72		74		76		80		85		85	
		22	Kebudayaan								4.226.030		7.417.050		6.080.000		6.130.000		5.780.000
			1	Pekan Kebudayaan Sekolah (PKS)	Terlaksananya pekan kebudayaan sekolah	1	Keg			100	200.000								
			2	Pelatihan pengelolaan sanggar seni budaya	Terkelolanya sanggar seni budaya	1	Keg			100	250.000	100	250.000						
			3	Pemeliharaan Rumah Adat	Terpeliharanya rumah adat	1	Keg			100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000
			4	Seminar kebudayaan alas		1	Keg			100	500.000	100	600.000	100	700.000	100	800.000	100	800.000

			5	Pelatihan seni dan budaya tradisional		1	Keg					100	150.000	100	150.000				100	150.000		
			6	Festival seni musik garapan tradisional	Terlaksananya Festival Seni Musik Garapan Tradisional	1	Keg					100	200.000	100	200.000		100	250.000				
			7	Festival kuliner tradisional	Terlaksananya Festival Kuliner Tradisional	1	Keg					100	100.000	100	120.000	100	145.000	100	150.000	100	150.000	
			8	Ekpedisi cagar budaya dan isi meusium	Terlaksananya Cagar Budaya dan Isi Museum	1	Keg					100	200.000			100	200.000					
			9	Pelaksanaan festival gayo alas mountain 2019 (gamipes)	Mengembangkan Kreatifitas Seniman Budayawan dan Perajin Tradisional	1	Keg					100	753.800	100	800.000	100	900.000	100	1.000.000	100	1.000.000	
			10	Penyusunan pokok pikiran daerah 2019	Tersedianya Referensi Nilai Budaya	1	Keg					100	170.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	
			11	Revitalisasi tugu pejuang kute lengat dan likat	Terlestarinya Nilai Sejarah	1	Keg					100	407.230									

			20	Pra Pekan Kebudayaan Aceh	Terlaksananya Pra PKA	1	Keg					100	550.000	100	550.000	100	550.000	100	550.000	
			21	Perlombaan Olahraga Tradisional Tingkat SD dan SMP	Terciptanya Siswa SD dan SMP yang unggul dalam olahraga tradisional	1	Keg					100	174.750	100	200.000	100	200.000	100	200.000	
			22	Pelatihan Pembuatan Payung Mesikhat	Terciptanya pengrajin Payung Mesikhat	1	Keg					100	200.000	100	200.000					
			23	Festival Kuliner Alas	Terlestarinya Masakan khas Alas	1	Keg					100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	
			24	Ekspose Budaya Alas (Culture Of Alas) Banda Aceh - Medan	Terlestarinya Budaya Alas	1	Keg					100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	
			25	Pemeliharaan dan Operasional Rumah Adat dan Gedung Kesenian	Terlestarikannya Cagar Budaya di Aceh Tenggara	1	Paket					100	350.000	100	350.000	100	350.000	100	350.000	
			26	Revitalisasi Makam Sililang	Terealisasinya Program Revitalisasi Makam Sililang	1	Paket					100	190.000							
			27	Pembangunan Rumah Penjaga pada Rumah Adat Desa Kampung Baru	Terealisasinya Pembangunan Rumah Penjaga pada Rumah Adat Desa Kampung Baru	1	Paket					100	220.000							

			28	Pembangunan Pagar Rumah Adat Gayo	Terealisasinya Pembangunan Pagar	1	Paket						100	468.000												
			29	Penimbunan Halaman Rumah Adat Gayo	Terealisasinya Penimbunan Halaman	1	Paket						100	301.300												
			30	Pengadaan Soundsistem dan Mobiler Gedung Kesenian		1	Paket						100	200.000												
			31	Revitalisasi Tugu/Benteng Kuta Lengat	Terealisasinya Program Revitalisasi Tugu/Benteng Kuta Lengat	1	Paket						100	100.000												
			32	Revitalisasi Tugu/Benteng Pejuang Likat	Terealisasinya Program Revitalisasi Tugu/Benteng Pejuang Likat	1	Paket						100	100.000												
JUMLAH																					12.967.339	101.411.549	966.620.690	161.654.149	167.079.503	966.615.100

B A B VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel 7.1 dan Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pendidikan								
1.1.	Angka partisipasi kasar	Persen							
a.	APK PAUD	Persen	43,29	43,30	43,32	43,35	43,37	43,40	43,4
b.	APK SD Paket A	Persen	n/a	80	85	90	95	100	100
c.	APK SMP Paket B	Persen	n/a	80	85	90	95	100	100
1.2.	Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen							0
a.	Tamat SD Sederajat	Persen	94,31	95,31	96,31	97,31	98,31	99,31	99,31
b.	Tamat SLTP sederajat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
c.	Tamat SLTA sederajat	Persen	81,78	82,78	83,78	84,78	85,78	86,78	86,78
d.	Tamat DI/DII/DIII	Persen	2,28	2,5	2,75	3	3,5	3,75	3,75
e.	Tamat D IV/S1	Persen	6,98	7	7,25	7,5	7,75	8	8

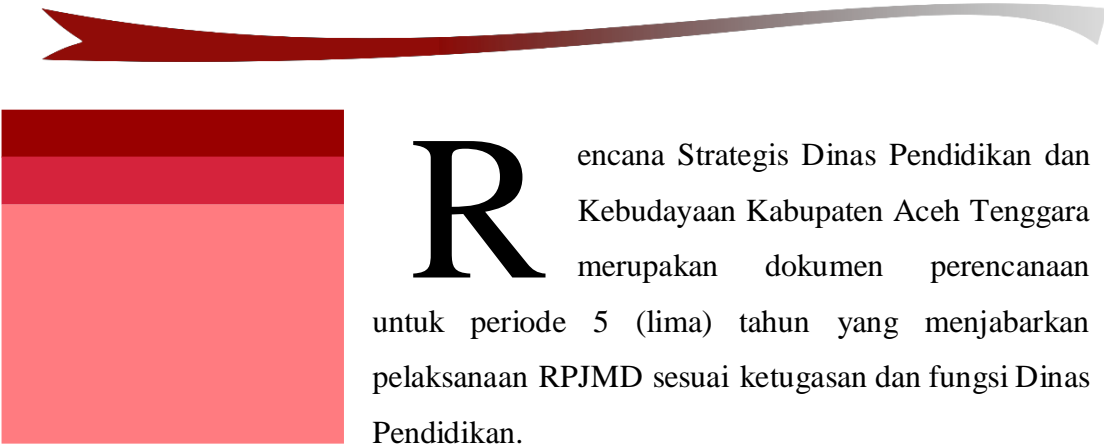
1.3.	Angka Partisipasi Murni								
a.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Paket A	Persen	88,02	89,02	90,02	90,02	91,02	92,02	92,02
b.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Paket B	Persen	82,69	83,69	84,69	84,69	85,69	86,69	86,69
1.4.	Angka Partisipasi Sekolah								
a.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD Paket A	Persen	99,49	99,5	99,51	99,52	99,53	99,54	99,54
b.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP Paket B	Persen	98,53	98,54	98,55	98,56	98,57	98,58	98,58
1.5.	Angka Putus Sekolah:								
a.	Angka Putus Sekolah (APS) SD	Persen	0,02	0,02	0,01	0	0	0	0
b.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP	Persen	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01	0	0
1.6.	Angka Kelulusan:								
a.	Angka Kelulusan (AL) SD	Persen	94,31	95,31	96,31	97,31	98,31	99,31	99,31
b.	Angka Kelulusan (AL) SMP	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.7.	Angka Melanjutkan (AM) Sekolah:								
a.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	Persen	85,24	86,24	87,24	88,24	89,24	90,24	90,235434

									96
b.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA	Persen	92,45	93,45	94,45	95,45	96,45	97,45	97,451154 53
1.8.	Fasilitas Pendidikan:								
a.	Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik	Persen	n/a	92	94	96	97	98	98
b.	Sekolah pendidikan SMP Sederajat kondisi bangunan baik	Persen	n/a	92	94	96	97	98	98
1.9.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah								
a.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD	Rasio Indeks	97,56	97,56	97,56	97,56	97,56	97,56	97,56
b.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP	Rasio Indeks	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75
1.10.	Rasio Guru terhadap Murid								
a.	Rasio Guru terhadap murid SD	Murid/Guru	22	22,1	22,2	22,3	22,4	22,5	22,5
b.	Rasio Guru terhadap murid SMP	Murid/Guru	22	22,1	22,2	22,3	22,4	22,5	22,5
c.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terakreditasi	Sekolah PAUD	n/a	15	30	45	60	75	75

1.11	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	n/a	92	94	96	97	98	98
1.12	Persentase jumlah penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis	Persen	78,71	78,73	78,75	78,77	78,8	78.85	78.85
1.13	Meningkatnya Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	Persen	n/a	70	75	80	85	90	90
1.14	Meningkatnya Angka Melek Huruf usia 15 - 24 tahun	Persen	n/a	80	82	85	90	95	95
1.15	Persentase angka partisipasi kasar (APK) SLB dan Layanan Khusus	Persen	n/a	80	85	90	95	100	100
1.16	Persentase Sekolah yang melaksanakan kurikulum berbasis syari'at	Persen	70	70	72	74	75	75	75
1.17	Persentase Guru yang mengikuti peningkatan kemampuan Dasar Keislaman	Persen	72	72	74	76	80	85	85
1.18	Persentase Sekolah yang memenuhi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal	%	n/a	80	85	90	95	100	100
1.19	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Kompetensi	%	n/a	75	78	80	82	85	85

B A B VIII

P E N U T U P



Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Dinas Pendidikan.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017- 2022 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pendidikan guna mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2017- 2022 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara menjadi pedoman untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2017 – 2022.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2017- 2022, maka berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Tahun 2017-2022 ke dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2019. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2017-2022.